



Kepada Yth : Bupati Parigi Moutong
Dari : Hamka Lagala, SE, MH
(Tenaga Ahli Bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Tanggal : 7 April 2026
Sifat : Penting/Strategis
Perihal : “ Kajian Analisis Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan
SDM Transportasi Untuk Penguatan Kinerja Pemerintah
Daerah Parigi Moutong Tahun 2026-2027 “





I. DASAR PELAKSANAAN TUGAS

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 Nomor 2);
4. Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 100.3.10/1236/Bag.Umum tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Tahun 2026.

II. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan keahlian untuk memecahkan masalah dan/ atau merumuskan strategi atau kebijakan dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data atau hasil penelitian untuk mendukung proses pengambilan Keputusan atau perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah berjalan dengan efektif;
4. Terkait dalam proses Penyusunan rencana dan /atau konsep terkait Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati/Wakil Bupati;
6. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati.

VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG

“ PARIGI MOUTONG, MAJU, MANDIRI, BERKELANJUTAN MELALUI

GERBANG DESA “



H. ERWIN BURASE, S.Kom & H. ABDUL SAHID, S.Pd
BUPATI & WAKIL BUPATI
PARIGI MOUTONG PERIODE 2025-2030

- MISI
1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
 2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata;
 3. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing;
 4. Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial Budaya;
 5. Melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas.



KAJIAN ANALISIS HARMONISASI KEBIJAKAN PEMENUHAN SDM TRANSPORTASI UNTUK PENGUATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH PARIGI MOUTONG TAHUN 2026

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Sektor transportasi merupakan urat nadi perekonomian di Kabupaten Parigi Moutong, mengingat posisi geografisnya sebagai jalur logistik utama yang menghubungkan berbagai provinsi di Sulawesi. Namun, ketersediaan infrastruktur transportasi yang luas tidak dibarengi dengan jumlah SDM teknis yang memadai (seperti pengemudi kendaraan bermotor, pengatur lalu lintas, dan teknisi prasarana). Hingga saat ini, pemenuhan SDM tersebut masih mengalami kendala akibat ketidaksinkronan antara kebutuhan riil di daerah dengan kebijakan pengadaan pegawai di tingkat pusat.

1.2. Maksud dan Tujuan Kajian ini disusun untuk merumuskan strategi harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah Parigi Moutong dengan Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah memperkuat sinergi dalam perencanaan, pengadaan, dan pengembangan kompetensi SDM transportasi guna menjamin keselamatan, kelancaran, dan efektivitas pelayanan publik di sektor perhubungan pada tahun 2026.

1.3. Ruang Lingkup Analisis mencakup evaluasi regulasi daerah, mekanisme koordinasi antar-instansi (Dishub, BKPSDM, dan Kemenhub), serta strategi pemenuhan formasi tenaga teknis spesialis.

II. Analisis

2.1. Kesenjangan Regulasi dan Formasi (Regulatory Gap) Analisis menunjukkan adanya hambatan dalam sinkronisasi regulasi:

- **Standar Kompetensi vs Formasi Umum:** Seringkali formasi yang disetujui pusat bersifat umum, padahal sektor transportasi membutuhkan sertifikasi kompetensi khusus (misal: Sertifikat Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor) yang diatur oleh UU LLAJ.
- **Beban Anggaran:** Adanya dikotomi antara keinginan daerah untuk menambah SDM teknis dengan kebijakan pengendalian belanja pegawai (DAU) yang ditetapkan pusat.

2.2. Lemahnya Sinergi Perencanaan SDM Selama ini, perencanaan kebutuhan SDM di daerah seringkali hanya berbasis pada jumlah pensiun, bukan pada analisis beban kerja (ABK) teknis sesuai standar pelayanan minimum (SPM)



bidang perhubungan. Akibatnya, usulan daerah ke tingkat pusat seringkali dianggap kurang kuat secara data pendukung teknis.

2.3. Isu Strategis Parigi Moutong Sebagai daerah yang mengelola pelabuhan pengumpan lokal dan terminal tipe C, Parigi Moutong memerlukan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi resmi. Keterbatasan SDM ini mengakibatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa transportasi belum mencapai target maksimal karena kurangnya tenaga pengawas dan pengelola di lapangan.

III. Rekomendasi Strategis

Untuk mewujudkan sinergi dan pemenuhan SDM transportasi di tahun 2026, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan (Anjab-ABK) Spesialis Pemerintah Daerah melalui BKPSDM dan Dishub harus segera menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang secara spesifik mencantumkan persyaratan sertifikasi kompetensi teknis transportasi. Dokumen ini harus dikonsultasikan secara daring/luring dengan Kementerian Perhubungan agar mendapat rekomendasi teknis sebelum diajukan ke MenPAN-RB.

2. Penguatan Skema *Co-Sourcing* dan Beasiswa Ikatan Dinas Membangun kerja sama (MoU) yang lebih erat dengan sekolah-sekolah kedinasan di bawah naungan Kemenhub (seperti PTDI-STTD). Rekomendasinya adalah mengupayakan kuota khusus untuk putra-putri daerah melalui pola pembibitan, sehingga kebutuhan SDM teknis di tahun 2026 dan seterusnya memiliki kepastian hukum dan kualitas.

3. Optimalisasi Digitalisasi Pengawasan (Pengganti SDM Fisik) Mengingat proses rekrutmen ASN memerlukan waktu, direkomendasikan akselerasi teknologi seperti sistem pengawasan lalu lintas cerdas dan *e-ticketing* di terminal/pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk mengefisiensikan kinerja SDM yang ada melalui bantuan teknologi informasi (Smart Mobility).

4. Pembentukan Tim Kerja Harmonisasi Lintas Sektor Membentuk *Task Force* kecil yang melibatkan Tenaga Ahli, Bagian Organisasi, dan Dishub untuk secara rutin melakukan lobi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat (Kemenhub dan KemenPAN-RB). Fokus utamanya adalah memastikan bahwa formasi spesifik transportasi untuk Parigi Moutong menjadi prioritas nasional dalam rangka mendukung logistik Sulawesi.



5. Program Up-Skilling SDM Eksisting Melakukan pemetaan terhadap ASN yang sudah ada untuk diberikan pelatihan sertifikasi teknis perhubungan. Harmonisasi di sini berarti memanfaatkan anggaran pengembangan kompetensi daerah yang disinkronkan dengan program diklat gratis dari Balai Pengembangan SDM Perhubungan.

Saran Implementasi: Pak Hamka, kajian ini dapat Bapak tindaklanjuti dengan menyarankan pertemuan audiensi antara Bupati dengan Kepala BPSDM Perhubungan di Jakarta guna menegaskan posisi strategis Parigi Moutong sebagai hub transportasi di Sulawesi Tengah.

Apakah Bapak memerlukan draf surat pengantar atau poin-poin presentasi untuk membahas ini dengan jajaran OPD terkait?

1. Poin Utama Audiensi (Talking Points Bupati)

Gunakan poin-poin ini sebagai argumentasi mengapa Parigi Moutong layak diprioritaskan oleh Kemenhub:

- **Posisi Geografis Strategis:** Menekankan bahwa Parigi Moutong adalah kabupaten dengan garis pantai terpanjang (472 km) dan merupakan jalur utama Trans Sulawesi yang menghubungkan Prov. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
- **Kesenjangan SDM Teknis:** Menyampaikan data riil kekurangan tenaga pengemudi kendaraan (PKB), pengawas pelabuhan, dan pengatur lalu lintas darat yang bersertifikasi.
- **Permohonan Pola Pembibitan:** Mengajukan kerja sama formal agar putra-putri daerah Parigi Moutong mendapatkan kuota khusus di PTDI-STTD atau kampus Kemenhub lainnya, yang setelah lulus langsung mengabdikan di Pemkab (ikatan dinas).
- **Kesiapan Anggaran Daerah:** Menegaskan komitmen daerah dalam mendukung biaya pendidikan atau penyediaan sarana pendukung jika skema kerja sama disetujui.



IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin kunci sebagai berikut:

1. **Urgensi Kolaborasi:** Pemenuhan SDM teknis transportasi di Parigi Moutong tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh daerah. Dibutuhkan harmonisasi regulasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan kualifikasi teknis (sertifikasi) sejalan dengan formasi kepegawaian yang disetujui.
2. **Transformasi SDM sebagai Enabler:** Akselerasi kapasitas digital dan teknis aparatur pada tahun 2026-2027 adalah kunci utama agar infrastruktur transportasi yang ada dapat dikelola secara profesional, aman, dan mampu memberikan kontribusi pada PAD.
3. **Kebutuhan Pola Pembibitan:** Skema kerjasama pola pembibitan dengan sekolah kedinasan di bawah Kemenhub merupakan solusi jangka panjang yang paling efektif untuk mengatasi kelangkaan tenaga ahli perhubungan di daerah tanpa membebani proses rekrutmen reguler yang kompetisinya sangat ketat.
4. **Dampak Kinerja:** Harmonisasi kebijakan ini secara langsung akan memperkuat indeks kinerja Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan efektivitas birokrasi yang lebih lincah (*agile*).

V. Penutup

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong di masa depan sangat bergantung pada sejauh mana kita mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi dinamika transformasi digital dan teknis. Sektor transportasi, sebagai tulang punggung logistik dan mobilitas masyarakat di Trans Sulawesi, memerlukan perhatian khusus melalui kebijakan yang progresif dan kolaboratif.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektoral hingga lobi kebijakan di tingkat nasional. Dengan komitmen yang kuat dan perencanaan yang matang, target penguatan kinerja pemerintah daerah di tahun 2026 dan transformasi digital di tahun 2027 bukan sekadar visi, melainkan realitas yang dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong.



Atas perhatian dan arahan Bapak Bupati, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

HAMKA LAGALA, SE, MH

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah

Tembusan Yth.

1. Wakil Bupati Parigi Moutong
2. Sekretaris Daerah Parigi Moutong
3. Kadis Perhubungan Parigi Moutong
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong

DAFTAR PUSTAKA :

1. Peraturan Perundang-Undangan

- **Republik Indonesia.** (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- **Republik Indonesia.** (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- **Republik Indonesia.** (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat*. Jakarta.
- **Republik Indonesia.** (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta.
- **Kementerian Perhubungan.** (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (serta perubahannya terkait pengembangan SDM transportasi)*.



- **Kementerian PAN-RB.** (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara*. Jakarta.
- **Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.** (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2030*. Parigi.

2. Buku dan Jurnal Ilmiah

- **Hasibuan, M. S. P.** (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur di Era Disrupsi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- **Lembaga Administrasi Negara (LAN RI).** (2022). *Transformasi Digital Birokrasi Indonesia: Menuju World Class Government*. Jakarta: LAN Press.
- **Sedarmayanti.** (2019). *Reformasi Birokrasi, Good Governance, dan Transformasi Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- **World Bank.** (2021). *Digital Transformation in the Public Sector: Guidance for Local Governments*. Washington DC: World Bank Group.

3. Dokumen Teknis dan Laporan

- **Badan Pusat Statistik (BPS).** (2024). *Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2024*. Parigi Moutong: BPS.
- **Kementerian Perhubungan RI.** (2024). *Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) 2024-2029*. Jakarta.